



Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 9 Januari 2023

Kepala Dinas,



Hj. RAHMAWATY, ST, MT

NIP. 19710726 199703 2 005

RINGKASAN EKSEKUTIF
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022

A. Sumber Pendanaan tahun 2022 sejumlah Rp. 12.820.144.518,00 dengan rincian

- APBD : Rp. 12.820.144.518,00
(termasuk belanja gaji dan tunjangan)
- Realisasi Keuangan : Rp. 12.055.501.458,00 (94,04%)
- Realisasi Fisik Kegiatan : 100%
- Sisa anggaran : Rp. 764.643.060,00

B. Hasil Pelaksanaan

- Terlaksananya Kegiatan Radio Talkshow Bupati Menjawab
- Terlaksananya Rapat PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah)
- Terlaksananya peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Tersedianya Berita Kegiatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik di media elektronik (media sosial, website, youtube, media massa online, televisi, dan radio), media cetak, maupun media luar ruangan (baliho dan videotron).
- Terlaksananya Siaran Tunda Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Media Televisi Lokal Kalsel
- Terlaksananya Siaran Langsung Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada media radio.
- Terlaksananya layanan pengaduan dan penyerapan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Tersedianya Advertorial Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada media cetak/ surat kabar.
- Tersedianya buku Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka dan Statistik Sektoral. Buku tersebut dibagikan ke Kecamatan dan Instansi lainnya.
- Terlaksananya kegiatan pelatihan Statistik Sektoral.
- Tersedianya Jaringan Intra Fiber Optik Pemerintah Daerah yang menghubungkan beberapa SKPD dan Fasilitas Publik di Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Tersedianya Aplikasi yang mendukung administrasi maupun pelayanan Pemkab HSS, diantaranya :
 - 1) Satu NIK (Aplikasi Data Kesehatan, Pendidikan, Sosial by name by adres)
 - 2) Si Open (Aplikasi Pengadaan)
 - 3) Aplikasi Esakip
 - 4) Aplikasi Satu Data Kabupaten
 - 5) Aplikasi Geoportal
- Terlaksananya layanan Tanda Tangan Elektronik untuk pejabat Pemkab HSS

- Terlaksananya Aplikasi Esurat / Srikandi Kearsipan (Tahap Ujicoba dari Arsip Nasional RI)
- Tersedianya CCTV publik pada 10 titik persimpangan jalan yang dapat diakses oleh publik melalui website.
- Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Menara Komunikasi Seluler

C. Permasalahan Dalam Realisasi

- Terdapat beberapa kegiatan seperti pembelian BBM, pemeliharaan dan pembelian suku cadang kendaraan tidak habis direalisasikan karena disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan.
- Pada Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi tidak habis direalisasikan keuangannya dikarenakan rapat koordinasi PPID dilaksanakan melalui zoom meeting sehingga anggaran yang disediakan untuk spanduk serta makanan dan minuman rapat tidak digunakan.

D. Tindak Lanjut

- Perhitungan Gaji pada penganggaran Gaji dan Tunjangan berikutnya perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPKPD sehingga sisa anggaran tidak begitu besar.
- Untuk Belanja barang maupun modal pada Tahun berikutnya dilaksanakan pada awal tahun, sehingga realisasi / pelaksanaan dapat terlaksananya sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	3
D. Struktur Organisasi.....	2
E. Peran dan Isu Strategis.....	14
F. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama	21
B. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
A.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	27
A.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2021	29
A.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir renstra (tahun 2023)	30
A.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar Nasional.....	30
B. Analisis Capaian Kinerja.	31
C. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.	37
D. Realisasi Anggaran.....	57
E. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	61
F. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022.....	62
F. 1 Evaluasi Kinerja Tahun 2022	62
F. 2 Tindak Lanjut	63
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
A. Tindak Lanjut	64

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	17
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Renstra Sebelum penyesuaian.....	19
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Renstra Setelah penyesuaian.....	19
Tabel 2.4 Kesesuaian Visi Misi Kepala Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	21
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	28
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022.....	28
Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2021	29
Tabel 3.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir renstra (tahun 2023)	30
Tabel 3.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar Nasional.....	30
Tabel 3.6 Data Desa Blankspot dan Tidak Blankspot	33
Tabel 3.7 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	37
Tabel 3.8 Produsen Data daerah yang terintegrasi dengan simpul jaringan kabupaten.....	41
Tabel 3.9 Aplikasi layanan pemerintahan yang tersedia	42
Tabel 3.10 Menara Telekomunikasi Seluler yang ada di Kabupaten hulu Sungai Selatan.....	45
Tabel 3.11 Perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah	45
Tabel 3.12 Layanan keamanan informasi	56
Tabel 3.13 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	56
Tabel 3. 14 Dokumen Keuangan.....	45
Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran.....	57
Tabel 3. 16 Tingkat Efisiensi penggunaan sumber daya.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Diskominfo Kab. HSS	13
Gambar 3.1 Grafik Capaian Kinerja Tahun 2022	29
Gambar 3.2 Grafik Nilai Indeks SPBE Kab. Hulu Sungai Selatan	32
Gambar 3.3 Grafik Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	41
Gambar 3.4 Tampilan situs cctv publik Pemkab HSS	45
Gambar 3.5 Tampilan layar depan aplikasi Srikandi	45
Gambar 3.6 Kegiatan Pengawasan Menara Telekomunikasi Seluler	50
Gambar 3.7 Website yang memuat informasi publik	52
Gambar 3.8 Website yang di monitoring	53
Gambar 3.9 Website Media Elektronik Mitra Strategis yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Daerah dan Nasional	53
Gambar 3.10 Media Cetak Mitra Strategis Yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan Dan Program Prioritas Nasional	54
Gambar 3.11 Gambar portal Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan	55
Gambar 3.12 Pelatihan Produsen Data untuk Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan	55
Gambar 3.13 Buku statistik yaitu Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Statistik Daerah	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan transparansi publik dalam mengelola tata pemerintah yang baik, pemerintah menerapkan penggunaan e-Government dalam salah satu tata kelola pemerintahan. Pengelolaan e-Government diperuntukkan untuk G2G (Government to Government), G2B (Government to Business) dan G2C (Government to Citizen). Ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2022 kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja, disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik selama Tahun 2022, sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes.

C. Tugas dan Fungsi Organisasi

Untuk melaksanakan transparansi publik dalam mengelola tata pemerintahan yang baik, pemerintah menerapkan penggunaan e-Government dalam salah satu tata kelola pemerintahan.

Pengelolaane-Government diperuntukkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berdiri tahun 2017, yang dulunya merupakan gabungan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Tugas, fungsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2020. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sesuai peraturan Bupati dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas;

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- f. evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang, dan 6 (enam) Sub Koordinator, serta Unit Pelaksana Tehnis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

1. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- j. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;

- c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kependidikan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- m. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- n. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

1.2. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan;
- j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

1.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan. Tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan;

- j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- b. penyusunan program operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

2.1. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Sub Koordinator Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Koordinator Pengelolaan dan Penguatan melaksanakan monitoring, menghimpun, menganalisa dan mengelola data opini, aspirasi, pengaduan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat terutama di media massa dan elektronik;
- b. melaksanakan monitoring informasi di media publik dan menyiapkan bahan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;

- c. menganalisa dan melaksanakan manajemen komunikasi krisis yang ada di masyarakat;
- d. menganalisa media komunikasi yang tepat sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta dalam penyelenggaraan dialog komunikasi publik;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan konten komunikasi informasi publik dari pemerintah melalui media luar ruangan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana publikasi dan komunikasi publik milik pemerintah;
- g. melaksanakan penguatan tata kelola Komisi Informasi di daerah sebagai media komunikasi publik;
- h. melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan asistensi pelaksanaan pengklasifikasian informasi publik dan kajian atas dampak serta konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- i. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Sub Koordinator Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

2.2. Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik.

Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik;
- b. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan layanan informasi publik dan hubungan media publikasi;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan bahan informasi, berita dan hasil pembangunan untuk dipublikasikan pada media publikasi pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengemasan ulang konten konten nasional menjadi konten dan pembuatan konten lokal;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan pengolahan dan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. melaksanakan desiminasi informasi dan pelayanan informasi publik melalui media massa dan elektronik;
- g. melaksanakan kemitraan dan layanan hubungan media, wartawan atau kalangan pers dalam rangka peliputan dan publikasi kegiatan pemerintah daerah;
- h. melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan, masyarakat dan komunitas guna mendukung pelayanan informasi publik pemerintah daerah;
- i. menyusun program dan menentukan jenis-jenis siaran pada televisi dan radio publikasi pemerintah daerah;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas informasi;
- k. menyiapkan dan mengolah bahan penjelasan, tanggapan dan keterangan pers;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

3. Bidang Persandian dan Statistik :

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- b. penyusunan program persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- d. pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan

statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Persandian dan Statistik terdiri :

3.1 Sub Koordinator Persandian

Sub Koordinator Persandian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengawasan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Koordinator Persandian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang persandian;
- c. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan persandian;
- d. menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan persandian;
- e. melaksanakan pencatatan dan agenda berita-berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- f. menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data jaringan sandi Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil Sandi;
- h. memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat Sandi;
- i. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
- j. melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian;
- k. menyiapkan bahan dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengamanan informasi pada pimpinan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Sub Koordinator Persandian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai bidang tugas.

3.2 Sub Koordinator Statistik

Sub Koordinator Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Koordinator Statistik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang statistik untuk mendukung pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan survey, kompilasi produk administrasi maupun cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelenggarakan statistik sektoral;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral;
- e. menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan statistik sektoral;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Sub Koordinator Statistik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai bidang tugas.

4. Bidang Teknologi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
- b. Penyusunan program pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
- c. Koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;

- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

4.1 Sub Koordinator Sarana Telekomunikasi dan Informatika

Sub Koordinator Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan layanan infrastruktur TIK yang meliputi jaringan intra pemerintah daerah, pusat data dan system penghubung layanan menuju *Smart City*.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Koordinator Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;
- b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten;
- c. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan intra Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pusat data Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sistem penghubung layanan (*message bus services*) aplikasi dan data Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Command Center Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana menuju Kabupaten *Smart City*;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi menara telekomunikasi;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan infrastruktur TIK;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Sub Koordinator Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai bidang tugas.

4.2 Sub Koordinator Aplikasi Teknologi Telekomunikasi dan Informatika
Sub Koordinator Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan layanan aplikasi SPBE, Pengelolaan Pusat Data, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), layanan sub domain, portal dan website Pemerintah Daerah, Integrasi layanan aplikasi publik dan pemerintahan menuju *Smart City*.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Koordinator Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan layanan aplikasi SPBE;
- c. melaksanakan pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta kerjasama teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis pemberdayaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- g. mengelola domain, sub domain, portal dan *website* Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Sub Koordinator Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai bidang tugas.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

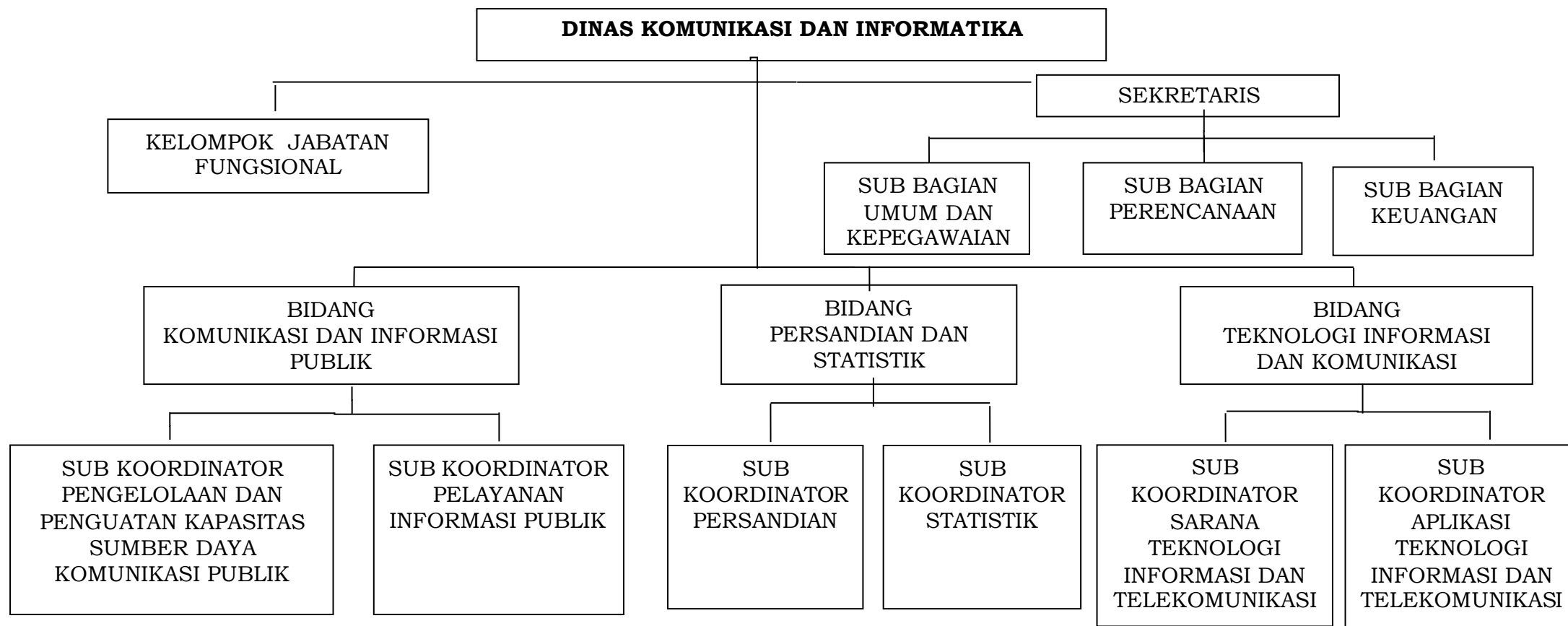
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jabatan fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 tahun 2020 sebagaimana telah dijelaskan diatas. Secara lengkap bagan

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam Gambar berikut :



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Diskominfo Kab. HSS

E. Peran dan Isu Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan strategis dalam berbagai permasalahan strategis antara lain:

1) Kurangnya SDM TIK

SDM bidang TIK masih tersebar diberbagai perangkat daerah, sementara untuk memenuhi kebutuhan SDM bidang TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika mengangkat pegawai outsourcing untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Masih rendahnya kompetensi sumber daya aparatur pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga diperlukan peningkatan kemampuan melalui diklat/bimbingan teknis, studi banding dan sosialisasi akan pentingnya pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika.

2) Infrastruktur Telekomunikasi

Walaupun telekomunikasi bukan merupakan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, namun peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyambung masyarakat akan kebutuhan akses telekomunikasi di daerah sangat dirasakan. Tidak semua desa tercover jaringan telekomunikasi dikarenakan kondisi geografis terdiri dari wilayah gunung dan rawa dan penyebaran penduduk tidak merata. Melalui koordinasi dan komunikasi dengan para penyelenggara telekomunikasi berkaitan dengan layanan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain penyampaian usulan penambahan dan peningkatan sinyal tower bts, menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan untuk dilakukan perbaikan.

3) Infrastruktur e-Government

Tidak semua OPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhubung dengan akses internet, jikapun terhubung dengan akses internet hanya menggunakan akses internet Vsat dengan bandwidth yang terbatas dan biaya sewa akses internet yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan menyewa akses internet Fiber Optik. Akses internet masih berdiri sendiri di masing-masing instansi/OPD dan masih banyak instansi/OPD yang belum tersedia akses internet. Dengan dibangunnya jalur/jaringan e-Government Pemkab. Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahap I pada tahun ini yang menghubungkan beberapa instansi Pemerintah yang ada di ibukota Kabupaten dalam satu jaringan intranet dan internet (jaringan e-Government) mampu memenuhi kebutuhan komunikasi dan pengelolaan data antar instansi.

4) Aplikasi e-Government

Tidak semua aplikasi Pemerintah Pusat dapat terintegrasi dengan aplikasi yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten. Belum optimalnya pengelolaan aplikasi pengaduan yang bersinergikan dengan media sosial serta tersajikan di dashboard bagi masyarakat, pengelola pengaduan dan pimpinan. Sebagian besar aplikasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten belum berbasis web dan mobile. Belum tersedianya aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

- 5) **Regulasi**
Masih adanya tugas pokok dan fungsi urusan komunikasi dan informatika yang masih tersebar di berbagai perangkat daerah sehingga masih terjadi tumpang tindih pelaksanaannya. Perumusan regulasi daerah yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi beeran penting dalam mengoptimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 6) **Statistik Sektoral**
Masih belum optimalnya penyelenggaraan urusan statistik sektoral dimana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah belum sepenuhnya dilaksanakan. Kurang lengkapnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data yang tidak saja menjadi rujukan pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Untuk itu diperlukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sehingga ketika di release, masyarakat dapat dengan mudah memahami, namun kurangnya SDM yang menangani urusan statistik juga menjadi kendala terhadap terlambatnya informasi yang direlease melalui website.
- 7) **Persandian**
Pelaksanaan urusan persandian belum dilaksanakan secara optimal selain masalah SDM persandian yang belum optimal, ditambah lagi dengan peralatan dan regulasi yang belum mendukung di pemerintah daerah.
- 8) **Komunikasi dan Informasi Publik**
Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan informasi melalui berbagai cara, yaitu: media televisi, media luar ruang, internet, radio, koran, dan media lainnya. Namun demikian, penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika terus berbenah untuk peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan penambahan konten-konten yang menarik diwebsite maupun media sosial Pemkab maupun website Diskominfo, peningkatan mutu berita/artikel yang terupdate dan release berita yang tepat waktu. Untuk menjangkau daerah yang belum terakses internet, melalui “Bupati Menjawab” merupakan kerjasama dengan Radio Lokal dengan sasaran terkelolanya informasi dan opini publik yang sedang viral dan berkembang di media kepada masyarakat dengan baik sehingga masyarakat pada akhirnya mendapatkan informasi yang benar dan akurat (bukan informasi hoak) sehingga opini yang berkembang dapat menjadi informasi berguna untuk masyarakat.

F. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan penjelasan umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi serta Permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

- BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2019-2023 beserta penyesuaian terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu:

1. Sub Bab Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut, dan
2. Sub Bab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

- BAB IV PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2022 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 yang memuat visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan. Disamping itu pula, diharapkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.1 Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi	: Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat		
Misi 5	: Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis		
Tujuan	: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi		
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terintegrasi	Memastikan tersedianya layanan pemerintahan berbasis elektronik	Mengembangkan sistem layanan pemerintahan berbasis elektronik
2	Meningkatnya Citra Positif Pemkab HSS	Memastikan Informasi pemerintah daerah yang terpublikasikan dengan cepat, akurat dan mudah diakses	Mengembangkan layanan publikasi informasi dengan cepat, akurat dan mudah diakses

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kerja Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan/ Lepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode Tahun 2020-2024 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyesuaian Rencana Stategis Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dilakukan penyesuaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mampu urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berdasar urusan dan program yang diampu, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendukung pencapaian misi kelima Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tercantum pada RPJMD yaitu “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Infomasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis”.

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Renstra sebelum Penyesuaian

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN
Meningkatnya penggunaan sistem komunikasi dan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah urusan Komunikasi dan Informatika	Nilai/Predkat
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik
Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Persentase Jangkauan teknologi informasi dan komunikasi
Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS	Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS	Rasio berita positif dan negatif di media massa tentang Kabupaten HSS
Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian	Meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian	Dokumen statistik yang tersedia
		%Pengamanan informasi daerah

Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Renstra Sesudah Penyesuaian

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Terwujudnya Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terintegrasi	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data sistem informasi
	Meningkatnya Citra Positif Pemkab HSS	Persentase Berita Positif mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam JMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi

kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah . Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini :

Tabel 2.4. Kesesuaian Visi Misi Kepala Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA JMD							KONDISI AKHIR	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang												
Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Terwujudnya Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terintegrasi	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data sistem informasi	Persen	-	-	5,1	25,6	46,2	69,2	100	100	
	Meningkatnya Citra Positif Pemkab HSS	Persentase Berita Positif mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja berisi pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terintegrasi	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data sistem informasi	Persen	69,2
2	Meningkatnya Citra Positif Pemkab HSS	Persentase Berita Positif mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persen	100

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 setelah revisi inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022.

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

Dalam rangka dalam upaya mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ditetapkanlah Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2022 yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.472.892.312
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.315.656.160
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	93.649.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.634.881.246
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	303.065.800
Jumlah	12.820.144.518

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung visi dan misi Bupati.

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

➤ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

➤ Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

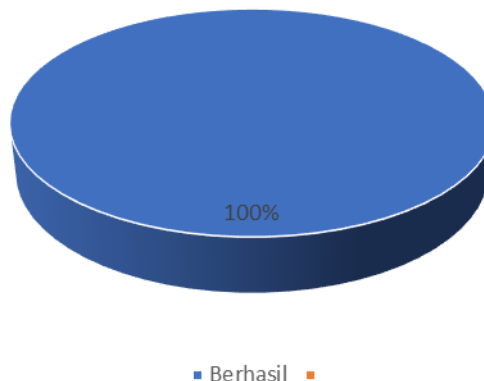
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 100%	Berhasil
2	70% < 100%	Cukup Berhasil
3	40% < 70%	Kurang Berhasil
4	<40%	Tidak Berhasil

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kominfo Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Dinas Kominfo Hulu Sungai Selatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
Sasaran Kinerja 1							
Terwujudnya Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terintegrasi							
1	Terwujudnya Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terintegrasi	Persen	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data sistem informasi	80	79,48	99,35	Berhasil
Sasaran Kinerja 2							
Meningkatnya Citra Positif Pemkab HSS							
2	Persentase Berita Positif mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persen	jumlah Pemberitaan Positif dibagi Pemberitaan Negatif dikali 100	100	100	100	Berhasil
RATA - RATA CAPAIAN						100	Berhasil



Gambar 3.1 Grafik Capaian Kinerja Tahun 2022

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Kinerja 1 Terwujudnya Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terintegrasi							
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data sistem informasi	Persen	Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan Sistem informasi dibagi jumlah seluruh stakholder dikali 100	80	79,48	99,35	berhasil

Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data sistem informasi

Capaian Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data sistem informasi adalah 99,35%, dengan capaian 79,48% dari target 80% dengan formulasi Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan Sistem informasi sejumlah 31 stakeholder dibagi dibagi jumlah seluruh stakholder. Adapun rincian Stakeholder yang memanfaatkan Sistem informasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.8 Stakeholder yang memanfaatkan Sistem informasi pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	APLIKASI UMUM	APLIKASI KHUSUS
1	Sekretariat Daerah	- Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Aplikasi Sistem Order Kabupaten Hulu Sungai Selatan	- Sistem Aplikasi Layanan Mahasiswa Berprestasi - Aplikasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) - Aplikasi Raport SKPD
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Aplikasi Satu NIK - Aplikasi layanan diskominfo - Aplikasi Satu Data - Aplikasi Open Data - Aplikasi Satu Peta - CCTV Pemkab - Email Pemkab	- Aplikasi Aplikasi Monitoring Jaringan - Aplikasi Aplikasi Monitoring Server - Aplikasi Email Resmi Pemda - Strategi Evaluasi Teknologi Informasi Organisasi
3	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri, - Aplikasi SIMDA BPKP	- PBB Online, BPHTB - Aplikasi Rekon Kertas Kerja BMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4	Dinas Pendidikan	-	- Pusdatu (PUSDATU (PUSAT DATA TERPADU) PAUD DAN PNF KAB.HSS) - Aplikasi SIPDBOS - SATU NIK

5	Dinas Kesehatan	-	- Aplikasi Info Resmi Corona Kab. HSS - STU NIK
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri	- SINOPEN Solusi Penduduk Non Permanen Memperoleh Dokumen Kependudukan
7	Dinas Sosial	- Aplikasi SIKS NG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial - Aplikasi DTKS	- Sistem Informasi Kemudahan Pelayanan Sarjana Pendamping Desa Sejahtera - SATU NIK
8	Dinas Ketahanan Pangan	- Sistem Informasi Harga Pokok	- Aplikasi Sistem Informasi Database Komoditas Asal Tumbuhan
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	- Aplikasi Sistem Informasi Statistik Perkawinan - Aplikasi Reporting Institusi Masyarakat Pedesaan - SATU NIK
10	Dinas Perhubungan	- Smart Blue Kementerian Perhubungan	- Aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Aplikasi Kearsipan / Srikandi	- Aplikasi iHulusungaiselatan / aplikasi perpustakaan digital
12	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	-	- Sistem Informasi Pembinaan Olahraga Prestasi Dan Rekreasi Terintegrasi - Aplikasi Sipandu - Aplikasi Optimasi Penilaian Kinerja Pegawai Non-ASN DISPORAPAR
14	Dinas Perdagangan	- Aplikasi Pengawasan Distribusi LPG 3KG	- Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan - Sistem Informasi Harga Bahan Pokok
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Aplikasi Musrembang Terpadu - Sistem Informasi Inovasi Daerah	- Aplikasi Geoportal Kab. HSS - Aplikasi Emonev - Elitbang - Emonev
16	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	-	- Aplikasi Kinerja Pegawai - Aplikasi Kepegawaian
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan	-
18	Inspektorat Daerah	- Aplikasi Whistle blowing System	- Aplikasi Unit Pengendali Grafifikasi
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Aplikasi Perizinan SiCANTIK	- Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan

20	Kecamatan Simpur	- Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Dana Desa	-
21	Kecamatan Sungai Raya	- Aplikasi monitoring BLT DESA	-
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	- Aksi RTLH Menta (Aplikasi Sinergitas Data Rumah Tidak Layak Huni Melalui Sinkronisasi Data dengan Dinas Sosial	-
23	Dinas Pertanian	- Sipetani - Simhutan - SIpedas Hortikultura - E-verval - Harga Tani - SiPas Horti	- SATU NIK
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	- SI-INSAN AIR LIMBAH - SI-INSAN DRAINASAE - SIMBG - AKSI BANGDA - SIM-SPAM	- SATU NIK
275	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		- si DODOL
26	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	- Satu data untuk Kementerian Koperasi dan UKM RI - cag.kemenkopukm.go.id	-
27	RSUD Hasan Basry	-	- AN NOOR/ SI IDAH PEDALAMAN - ROKET (REGISTRASI ONLINE KE RUMAH SAKIT)/ SI IDAH PEDALAMAN

Capaian pada indikator ini didapat dengan faktor meningkatnya akses sistem informasi dengan indikator Jumlah Kunjungan pada Sitem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun dengan jumlah capaian 723.642 kali kunjungan pada sistem informasi. Meningkatnya akses sistem informasi tersebut dicapai dengan beberapa faktor, antara lain:

1. Tersedianya Akses Internet Mudah dan Aman

Ketersediaan Akses Internet Mudah dan Aman dengan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah intra pemerintah daerah dengan Badwith minimal 20 mMbps. Adapun Perangkat daerah yang terhubung dengan sistem jaringan intra pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3) Inspektorat
- 4) Sekretariat Dewan
- 5) Dinas Perhubungan
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 7) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- 8) Rumah Sakit Umum Daerah Bridjen H. Hasan Basry Kandangan
- 9) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 10) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- 11) Dinas Pendidikan
 - 12) Dinas Kesehatan
 - 13) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - 14) Dinas Pertanian
 - 15) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
 - 16) Dinas Sosial
 - 17) Dinas Ketahanan Pangan
 - 18) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 19) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 20) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 22) Dinas Perikanan
 - 23) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
 - 24) Dinas Perdagangan
 - 25) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
 - 26) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 28) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 29) Kecamatan Kandangan
2. Terlaksananya Survei Pemetaan Blankspot Intenet

Dengan dilaksanakannya pemetaan blankspot maka didapat data wilayah yang tidak terdapat akses internet/Blankspot, wilayah tersebut sebagai berikut :

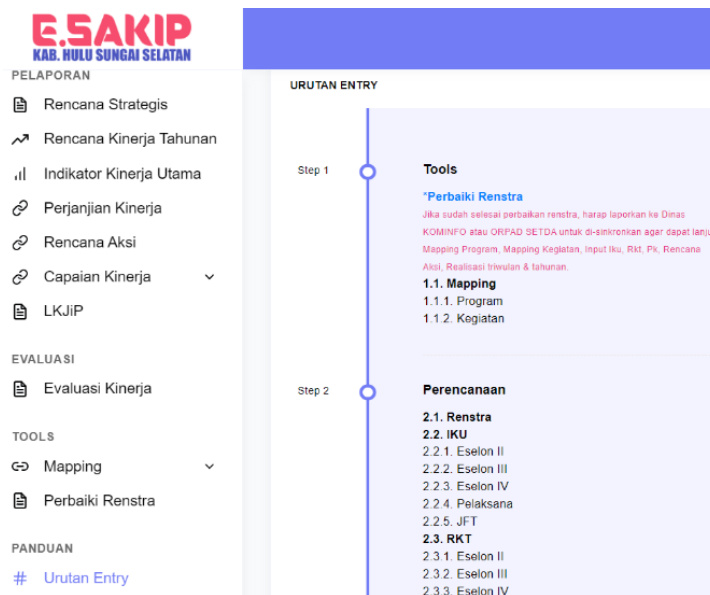
No	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Bumi Berkat	Sungai Raya
2	Batang Kulur Kiri	
3	Tamiyang	
4	Batu Bini	Padang Batung
5	Madang	
6	Malilingin	
7	Ambutun	Telaga Langsung
8	Hamak	
9	Muning Dalam	Daha Selatan
10	Kamawakan	Loksado
11	Lok Lahung	
12	Haratai	
13	Ulang	

3. Tersedianya panduan/informasi Penggunaan Sistem Informasi
- Setiap Sistem Informasi menyediakan panduan/informasi Penggunaan untuk tujuan memudahkan pengguna dalam hal pemanfaatan sistem informasi, contoh ketersediaan Panduan sebagai berikut :

- Panduan Sistem Informasi SATU NIK



- Panduan ESAKIP



4. Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi

Setiap Sistem Informasi yang diimplementasikan akan disosialisasikan dan dilakukan bimtek penggunaan, dengan tujuan memudahkan pengguna dalam hal pemanfaatan sistem informasi.

Gambar 3.1 Bimtek Aplikasi



5. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Internet

Adapun daftar unit sarana dan prasarana Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah intra pemerintah daerah dengan Bandwidth minimal 20 mMbps adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah

- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3) Inspektorat
- 4) Sekretariat Dewan
- 5) Dinas Perhubungan
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 7) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- 8) Rumah Sakit Umum Daerah Bridjen H. Hasan Basry Kandungan
- 9) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 10) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 11) Dinas Pendidikan
- 12) Dinas Kesehatan
- 13) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- 14) Dinas Pertanian
- 15) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
- 16) Dinas Sosial
- 17) Dinas Ketahanan Pangan
- 18) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 19) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 20) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 22) Dinas Perikanan
- 23) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
- 24) Dinas Perdagangan
- 25) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
- 26) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 28) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 29) Kecamatan Kandungan

6. Tersedianya aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
Adapun daftar aplikasi tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA SISTEM ELEKTRONIK
1	Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
2	Aplikasi Sistem Order Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	Sistem Aplikasi Layanan Mahasiswa Berprestasi
4	Aplikasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
5	Aplikasi Raport SKPD
6	Aplikasi Email Resmi Pemda
7	Aplikasi Satu NIK
8	Aplikasi layanan diskominfo
9	Aplikasi Satu Data
10	Aplikasi Open Data Aplikasi Satu Peta
11	Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri,
12	Aplikasi SIMDA BPKP

13	PBB Online, BPHTB
14	Aplikasi Rekon Kertas Kerja BMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
15	Aplikasi Info Resmi Corona Kab. HSS
16	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri
17	Aplikasi SIKS NG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial -
18	Aplikasi Sistem Informasi Database Komoditas Asal Tumbuhan
19	Aplikasi Sistem Informasi Statistik Perkawinan
20	Aplikasi Reporting Institusi Masyarakat Pedesaan
21	Aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor
22	Aplikasi Geoportal
23	Sistem Informasi Harga Bahan Pokok
24	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
25	Sistem Informasi Inovasi Daerah
26	Aplikasi Musrembang Terpadu
27	Aplikasi Geoportal Kab. HSS
28	Aplikasi Kinerja Pegawai
29	Aplikasi Kepegawaian
30	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan
31	Aplikasi Whistle blowing System
32	Aplikasi Unit Pengendali Grafifikasi
33	Aplikasi Perizinan SiCANTIK
34	Aplikasi Data Penelitian
35	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Anggaran Perangkat Daerah
36	Aplikasi geoportal
37	Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD
38	Aplikasi Layanan Diskominfo
39	Aplikasi Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan
40	Aplikasi Strategi Evaluasi Teknologi Informasi Organisasi
41	Aplikasi Barang Persediaan
42	Aplikasi Sistem informasi database komoditas asal tumbuhan
43	Sistem Informasi Musrembang
44	Sistem Informasi Pengawasan Distribusi LPG

7. Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola

Capaian pada indikator ini sebesar 100%, didapat dari capaian 12 Pusat data yang dikelola dari target 12 Pusat data. Pusat Data ini digunakan untuk menyimpan seluruh aplikasi / sistem elektronik dan data elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar 3.1 Pusat Data Pemerintahan Daerah



Tersedianya Sistem Informasi yang aman

Meningkatnya Kualitas Database

- Persentase Data database yang sesuai Standar Data Indonesia

Capaian Persentase ketersediaan data statistik sektoral sesuai SDI yang mencapai level 3 (transaksi) adalah 100, dengan capaian 100% dari target 100% dengan formulasi Jumlah perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral yang sesuai standar SDI sebanyak 39 SKPD dibagi jumlah seluruh SKPD yaitu 39 SKPD.

- Persentase Pengelola Data Yang Berkompeten

Setiap SKPD selaku Produsen Data memiliki 1 (satu) orang sebagai admin atau petugas pengumpul dan penginput data. Admin tersebut secara berkala diberikan sosialisasi dan pelatihan berupa Bimtek yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun dengan menghadirkan narasumber dari BPS selaku Pembina data, sehingga capaian persentase ketersediaan pengelola data yang berkompeten mencapai 100% yaitu 39 orang yang tersebar diseluruh SKPD.

- Tersedianya variasi data yang handal.

Data Statistik sektoral telah dilakukan pemetaan di setiap SKPD, adapun rincian data sesuai asal SKPD sebagai Penyedia data Statistik Sektoral sebagai berikut:

Tabel 4.2. Data SKPD dan Data Statistik Sektoral yang disediakan

No	SKPD	Nama Data	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Dataset ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut Jabatan berdasarkan jenis kelamin
		2	Dataset ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
		3	Dataset ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin
		4	Dataset Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Menurut Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	5	Data Organisasi Kemasyarakatan Aktif Kab. HSS
		6	Data Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kab. HSS
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Daerah Rawan Bencana
		8	Data Kebakaran Hutan dan lahan
		9	Data Masyarakat Terdampak Bencana
		10	Tim Relawan BPBD 2022
		11	Data Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		12	Usulan Permohonan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		13	Peralatan dan Kondisi Fisik
		14	Rekap Hotspot
		15	Data Bencana Banjir
		16	Data Bencana Longsor
17	Data Bencana Angin puting Beliung		

4	Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah	18	Laporan Realisasi Anggaran
		19	Neraca
		20	Laporan Arus Kas
		21	Calk Pemerintah Daerah
		22	Realisasi Belanja Daerah
		23	Realisasi Pembiayaan Daerah
		24	Realisasi Pendapatan Daerah
		25	Jenis Pajak yang dipungut
		26	Ringkasan APBD
		27	Ringkasan APBD Perubahan
5	Dinas Ketahanan Pangan	28	Data Cadangan Pangan Masyarakat
		29	Data Cadangan Pangan Masyarakat (Irons Stock)
		30	Data LPM/LPMDES Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		31	Data Cadangan Pangan Pemerintah / CPP
		32	Data Rekapitulasi Jumlah Hasil Alat Uji Pangan Segar
		33	Data Rincian Desa dengan KRPL
		34	Data Pola Pangan Harapan
		35	Data Neraca Bahan Pangan (NBM)
		36	Data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	37	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
		38	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
		39	Renja BKD
		40	Renja BPBD
		41	Renja Bakaeuda
		42	Renja Bappelitbangda
		43	Renja Dinkes
		44	Renja Ketahanan Pangan
		45	Renja Diskominfo
		46	Renja Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		47	Renja Dispera KPLH
		48	Renja Dinas Perdagangan
		49	Renja Dinas Perhubungan
		50	Renja Dinas Perikanan
		51	Renja Dinas Perpustakaan & Kearsipan
		52	Renja Dinas Pertanian
		53	Renja Dinas PMD
		54	Renja Dinas PMPTSP
		55	Renja Dinas Porpar
		56	Renja Dinas PPKBPPA
		57	Renja Dinas PUTR
		58	Renja Dinas Sosial
		59	Renja Disdukcatpil
		60	Renja Disnakerkop UKP
		61	Renja Inspektorat
		62	Renja RS Pratama Daha
		63	Renja RSUD HHB
64	Renja Satpol PP		

		65	Renja Sekretariat DPRD
		66	Renja Setda Bag. Ekobang
		67	Renja Setda Bag. Hukum
		68	Renja Setda Bag. Kesra
		69	Renja Setda Bag. Organisasi
		70	Renja Setda Bag. PBJ
		71	Renja Setda Bag. Tapem
		72	Renja Setda Bag. Protokol & Humas
		73	Renja Setda Bag. Umum
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74	Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		75	Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		76	Kepemilikia Kartu Identitas Anak
		77	Perekaman KTP Elektronik
		78	Kepemilikan Akta Kelahiran umur 0-18 tahun
		79	Kepemilikan Akta Kematian
		80	Inovasi
8	Dinas Kesehatan	81	Data Rumah Sakit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		82	Data Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		83	Data Puskesmas Pembantu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		84	Data Poskesdes di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		85	Data Posyandu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		86	Data Tenaga Teknis Kefarmasian di Puskesmas
		87	Data Tenaga Perawat Gigi di Puskesmas
		88	Data Tenaga Perawat di Puskesmas
		89	Data Tenaga Laboratorium di Puskesmas
		90	Data Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
		91	Data Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
		92	Data Tenaga Gizi di Puskesmas
		93	Data Tenaga Dokter Umum di Puskesmas
		94	Data Tenaga Dokter Gigi di Puskesmas
		95	Data Tenaga Bidan di Puskesmas
		96	Data Tenaga Apoteker di Puskesmas
		97	Data Posyandu Lansia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		98	Data Posbindu PTM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		99	Data Kematian Ibu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		100	Data Kematian Bayi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		101	Data Covid 19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		102	Data Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		103	Data Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Kabupaten Hulu Sungai Selatan
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	104	Perkembangan BUMDESA / BUMDESMA Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		105	Nama Desa - Desa Se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		106	Realisasi APBDES Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata	107	Data Perolehan Medali POPDA Kab.HSS
		108	Data Hotel/Penginapan di Kabupaten HSS
		109	Data Perkembangan Jumlah Objek Wisata Kab. HSS
		110	Daftar Hotel/Penginapan di Kawasan Wisata Loksado

11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	111	Data Jumlah Penerima Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Per Kecamatan
		112	Data Jumlah Penerima Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Per Kecamatan
		113	Data Jumlah Irigasi Permukaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		114	Data Luas Irigasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		115	Data Panjang Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		116	Data Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		117	Data Klasifikasi Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		118	Data Jumlah Jembatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
12	Diskominfo	119	Data Menara Telekomunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		120	Data Aplikasi Yang dikelola Dinas Kominfo Kab. HSS
		121	Data SKPD yang terhubung dengan jaringan Intranet
		122	Data Media Lokal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		123	Data Website dan Akun Media Sosial sarana Publikasi dan Komunikasi Publik yang dikelola Dinas Kominfo Kab. HSS
		124	Data SKPD Pengguna Sertifikat Elektronik Yang diterbitkan BSSN
		125	Data Jumlah Surat Elektronik dari Sanapati
126	Data SKPD yang memiliki Rekomendasi BPS		
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	127	Unmeet Need
		128	Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate)
		129	Data Sekolah Ramah Anak
		130	Data Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		131	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga
		132	Jumlah PATBM dan FAD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		133	Data Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
14	Dinas Perdagangan	134	Jumlah Pasar se Kab. Hulu Sungai Selatan
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	135	Data TKB SMP Terbuka
		136	Jumlah Siswa SMP Terbuka Se Kab. Hulu Sungai Selatan
		137	Jumlah SMP Terbuka se Kab. Hulu Sungai Selatan
		138	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Kelompok Bermain se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		139	Jumlah PTK pada PKBM se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		140	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD Sejenis se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		141	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Tempat Penitipan Anak se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		142	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Taman Kanak Kanak se Kabupaten Hulu Sungai Selatan

143	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
144	Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Dasar se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
145	Titik Koordinat Sekolah Menengah Pertama
146	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
147	Jumlah Rombel SMP
148	Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Se Kab. Hulu Sungai Selatan
149	Jumlah Sekolah Dasar Se Kab. Hulu Sungai Selatan
150	Data TK Se Kab. Hulu Sungai Selatan
151	Jumlah siswa TK se Kab. Hulu Sungai Selatan
152	Data PKBM se kab. Hulu Sungai Selatan
153	Jumlah Siswa PKBM se Kab Hulu Sungai Selatan
154	Data SMP Se Kab. Hulu Sungai Selatan
155	Nama Sekolah dan Jumlah Siswa SMP se Kab. Hulu Sungai Selatan
156	Data Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
157	Jumlah Tempat Penitipan Anak (TPA) Se Kab. Hulu Sungai Selatan
158	Jumlah Kelompok Bermain (KB) se Kab. Hulu Sungai Selatan
159	Jumlah Satuan Paud Sejenis se Kab. Hulu Sungai Selatan
160	Jumlah Guru SD Disdik Kab. Hulu Sungai Selatan
161	Jumlah Guru SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
162	Jumlah Guru SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
163	Data Guru SMP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
164	Data Guru TK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
165	Data Peserta Didik SD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
166	Jumlah Peserta Didik SMA di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
167	Jumlah Peserta Didik SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
168	Jumlah Peserta Didik SMP di Kab. Hulu Sungai Selatan
169	Jumlah Peserta Didik TK di Kab. Hulu Sungai Selatan
170	Jumlah SD di Kab. Hulu Sungai Selatan
171	Jumlah SMA di Kab. Hulu Sungai Selatan
172	Jumlah SMK di Kab. Hulu Sungai Selatan
173	Jumlah SMP di Kab. Hulu Sungai Selatan
174	Jumlah TK di Kab. Hulu Sungai Selatan
175	Jumlah Guru SD per kecamatan di Kab. Hulu Sungai Selatan
176	Jumlah Sanggar Seni Budaya
177	Jumlah Balai Adat
178	Jumlah Peserta Disdik TPA
179	Jumlah Peserta Didik SKB
180	Jumlah Peserta Didik SPS

		181	Jumlah Peserta Didik PKBM
		182	Jumlah Peserta Didik SLB
		183	Jumlah Peserta Didik KB
		184	Data Anak Tidak Sekolah yang Telah Dicovert oleh PKBM dan SKB
16	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu(PMPTSP)	185	Data Izin Perdagangan Perorangan
		186	Data Izin Usaha Perdagangan Perseroan Terbatas
		187	Data Izin Usaha Perdagangan Perorangan
		188	Data Izin Usaha Perdagangan Perorangan Commanditaire Vennootschap (CV)
		189	Data Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Badan Usaha Lainnya (BUL)
		190	Data Usaha Perdagangan dan Badan Usaha Lainnya
		191	Data PMDN Wajib LKPM
		192	Data LKPM
17	Dinas Pertanian	193	Rekapitulasi Data Populasi Ternak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		194	Data Produksi Jagung dan Kedelai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		195	Data Luas Lahan Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		196	Data Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak Digunakan di Kab. HSS
		197	Database Bidang Penyuluhan dan Usaha Pertanian
		198	Rekapitulasi e-RDKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		199	Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		200	Jumlah Pos Penyuluhan, PPL dan Kelompok Tani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		201	Harga Komoditi Tanaman Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		202	Harga Komoditi Hortikultura di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
18	Dinas Perikanan	203	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum di Kab. Hulu Sungai Selatan
		204	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Kab. Hulu Sungai Selatan
		205	Jumlah RTP Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Hulu Sungai selatan
		206	Jumlah RTP Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kab. Hulu Sungai Selatan
		207	Jumlah Perahu / Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		208	Jumlah Alat Penangkap Ikan Menurut jenis Alat di Kabupaten Hulu Sungai Selata
19	Dinas Perhubungan	209	Data Pelabuhan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		210	Data Halte Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		211	Data Lampu Lalu Lintas
		212	Data Terminal di Kabupater Hulu Sungai Selatan
		213	Data Trayek Kabupaten Hulu Sungai Selatan
20		214	Data perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	215	Data koleksi perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		216	Data tenaga perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		217	Data anggota perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		218	Data pengunjung perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		219	Data Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
21	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan	220	Data Sekolah Adiwiyata Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		221	Data Kampung Iklim Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		222	Data Ruang Bermain Anak (RBA) Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		223	Data Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pengelolaan Persampahan
		224	Data Bidang Pengelolaan Persampahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kumpulan data umum, sarana prasarana dan volume angkutan sampah tahun 2020)
		225	Data TPA, TPS3R dan Sebaran Lokasi TPS Layanan Persampahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		226	Data Penyerahan PSU Perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		227	Data Lokasi Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
22	Dinas Sosial	228	Data Panti Asuhan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		229	PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL
		230	PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
		231	TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
		232	TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)
		233	Pendamping PKH Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		234	SLRT Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		235	LKS Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		236	KARANG TARUNA
		237	Data Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (SaMping DeSa) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		238	DATA DTKS KAB. HSS
		239	Data JADUP Kab. HSS
		240	DATA RASTRADA KAB. HSS
		241	DATA PKH KAB. HSS
		242	Data BPNT Kab. HSS
		243	Data UEP Kab. HSS
		244	DATA BENCANA ALAM
		245	Data PKSA Kab. HSS
		246	Data Berupaya Kab. HSS
		247	Data PRS Kab.HSS
		248	Data Korban Penyalahgunaan Napza Kab. HSS
		249	Data Anak Dengan Kedisabilitan (ADK) Kab. HSS
		250	DATA ANAK BALITA TERLANTAR DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
		251	Data Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kab.HSS

		252	Data Anak Terlantar Kab. HSS
		253	Data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kab. HSS
		254	Data Fakir Miskin Kab. HSS
		255	Data Penyandang Disabilitas Kab. HSS
		256	Data Pengemis Kab. HSS
		257	Data Lansia Terlantar Kab. HSS
		258	Data Korban Tindak Kekerasan Kab. HSS
		259	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		260	Data Rumah Singgah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		261	PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
23	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	262	Data Pencari Kerja
		263	Data Peserta Pelatihan
		264	Data Pemagangan
		265	Data Wirausaha Baru UKM
		266	Data Penerima Bantuan UMKM
		267	Data Koperasi Sehat
		268	Data IKM Kab. HSS
		269	Data IKM yang sudah besertifikat halal
		270	Data IKM yang sudah tesertikat PIRT (Produksi Izin Rumah Tangga)
24	Inspektorat	271	Data Temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		272	Jumlah Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		273	Jumlah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		274	Jumlah Objek Pemeriksaan Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
		275	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
25	Kecamatan Daha Utara	276	Data Desa Se Kecamatan Daha Utara
26	Kecamatan Angkinang	277	Data Desa Se Kecamatan Angkinang
27	Kecamatan Daha Selatan	278	Data Desa Se Kecamatan Daha Selatan
28	Kecamatan Daha Barat	279	Data Desa Se Kecamatan Daha Barat
29	Kecamatan Padang Batung	280	Data Desa Se Kecamatan Padang Batung
30	Kecamatan Kalumpang	281	Data Desa Se Kecamatan Kalumpang
31	Kecamatan Loksado	282	Data Desa Se Kecamatan Loksado
32	Kecamatan Kandangan	283	Data Desa Se Kecamatan Kandangan
33	Kecamatan Simpur	284	Data Desa Se Kecamatan Simpur

34	Kecamatan Telaga Langsat	285	Data Desa Se Kecamatan Telaga Langsat
35	Kecamatan Sungai Raya	286	Data Desa Se Kecamatan Sungai raya
36	RSUD Brigj. H. Hasan Basry	287	Dataset Poliklinik/Pelayanan Rawat Jalan
		288	Dataset Jumlah Tempat Tidur Per-Ruangan
		289	Dataset Instalasi Laboratorium (Patologi Anatomi (PA))
		290	Dataset Instalasi Laboratorium (Patologi Anatomi (PA))
		291	Dataset Instalasi Laboratorium (Patologi Anatomi (PA))
		292	Dataset Instalasi Radiologi
		293	Dataset Ruangan Rawat Inap
		294	Dataset Sumber Daya Manusia (SDM)
		295	Dataset BOR LOS TOI
		296	Dataset Ruang Isolasi Covid 19
		297	Dataset Ruang Anak
		298	Dataset Ruang VIP
		299	Dataset Ruang Saraf (Stroke Corner)
		300	Dataset Ruang PICU NICU
		301	Dataset Rawat Jalan
		302	Dataset Ruang Saraf
		303	Dataset Ruang Penyakit Dalam
		304	Dataset Ruang Paru
		305	Dataset Ruang Mata/THT
		306	Dataset Ruang ICU
		307	Dataset Ruang Bersalin
		308	Dataset Ruang Bedah
		309	Dataset Rawat Inap
		310	Dataset Poliklinik MCU
		311	Dataset Poliklinik Nafza
		312	Dataset Poliklinik Konseling Terapi
		313	Dataset Poliklinik VCT
		314	Dataset Poliklinik THT
315	Dataset Poliklinik Saraf		
316	Dataset Poliklinik Rehabilitasi Medik Fisioterapi		
317	Dataset Poliklinik Psikologi		
318	Dataset Poliklinik Jantung Dan Pembuluh Darah		
319	Dataset Poliklinik Penyakit Dalam		
320	Dataset Poliklinik Paru		
321	Dataset Poliklinik Mata		
322	Dataset Poliklinik Kulit & Kelamin		
323	Dataset Poliklinik Kandungan		
324	Dataset Poliklinik Jiwa Psikiatri		
325	Dataset Poliklinik Gizi		
326	Dataset Poliklinik Bedah Orthopaedi		
327	Dataset Poliklinik Gigi dan Mulut		
328	Dataset Poliklinik Geriatri		
329	Dataset Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
330	Dataset Instalasi Bedah Sentral (IBS)		

		331	Dataset Poliklinik Bedah
		332	Dataset Hemodialisa
		333	Dataset Poliklinik Anak
37	SatpolPP & Damkar	334	Data Satuan Pelindungan Masyarakat Kab. HSS
		335	DATA UNIT PEMADAM KEBAKARAN (BPK/PMK) KAB. HSS
		336	Data Jumlah Personel Satpol PP dan Damkar
		337	Jumlah POSKAMLING di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
38	Sekretariat Daerah	338	Renja Setda Bag. Ekobang
		339	Renja Setda Bag. Hukum
		340	Renja Setda Bag. Kesra
		341	Renja Setda Bag. Organisasi
		342	Renja Setda Bag. PBJ
		343	Renja Setda Bag. Tapem
		344	Renja Setda Bag. Protokol & Humas
		345	Renja Setda Bag. Umum
39	Sekretariat DPRD	346	Data Struktur dan Profil DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		347	Data daftar susunan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		348	Pembentukan Fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Database yang terkumpul dan terinput di Satu Data Hulu Sungai Selatan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, baik kelengkapan metadata dan kode referensi data.

The screenshot shows the 'Data Menara Telekomunikasi' dataset page on the Satu Data portal. The page includes a description of the data, a metadata table, and navigation options.

Data and Resources

- Tahun 2021 - Data Menara Telekomunikasi
Data berikut berisi informasi: NO : Nomor Urut Data ALAMAT MENARA : Alamat... [Explore -](#)
- Tahun 2022 - Data Menara Telekomunikasi
Data berikut berisi informasi: NO : Nomor Urut Data ALAMAT MENARA : Alamat... [Explore -](#)

Metadata

Field	Nilai
Sumber	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pembuat	Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Pemelihara	Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Versi	1.0
Last Updated	5 Juni 2023, 16.01 (UTC+08:00)
Dibuat	16 November 2021, 09.24 (UTC+08:00)
Cakupan Wilayah	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kode Wilayah	6306
No. Rekomendasi BPS	1 56/63060/OT. 1 30/07/2022
Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data	September - Desember Tahun Berjalan
Periode Update Data	Tahunan
Rilis/Diseminasi Data	Januari Tahun Berikutnya
Tehnik Pengumpulan Data	Pendataan dilapangan
Tujuan	untuk mengetahui jumlah menara BTS di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Keterangan gambar: contoh database dan kelengkapan metadatanya

Dinas Komunikasi dan Informatika secara rutin juga melaksanakan publikasi secara fisik dengan melakukan penggandaan dan penyebaran terhadap 3 (tiga) jenis dokumen statistik dasar dan statistic sektoral produk BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka serta Statistik Daerah.

- Tersedianya Laporan Monev Berkala

Untuk menjaga kualitas manajemen data dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada akhir semester 1 dan pada akhir tahun anggaran. Monev dilakukan baik terhadap kinerja Admin setiap produsen data juga terhadap data-data yang dihasilkan. Data-data yang terinput akan dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi kegiatan monev dan akan dilakukan pemutakhiran sesuai jadwal update yang telah ditentukan.

Tersedianya Layanan Keamanan Informasi

Dalam rangka Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Hulu Sungai Selatan sudah membuat Perbup Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah memuat terkait Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) dimana dalam pelaksanaannya selama ini kita memakai e-mail Sanapati yang terhubung satu titik (1) antara Pusat dan Daerah, namun untuk penggunaan di beberapa SKPD lain masih menggunakan kurir belum terbentuk jaring komunikasi sandi.

9. Terlaksananya Uji Ketahanan Sistem Informasi

Berdasarkan hasil Indeks KAMI, Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah di Audit dengan resiko kategori rendah ada 72 dan jumlah Sistem Elektronik yang ada di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 75, sementara yang diukur untuk Tahun Anggaran 2022 adalah Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Website yang telah memakai SSL/HTTP dapat dikategorikan resiko aman .Adapun rincian Sebagai berikut

1. BAGHUKUM

<https://baghukum.hulusungaiselatankab.go.id>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

2. SI IDA BUNGA DESA (BLTDESA)

<https://bltdesa.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Informasi Data Bantuan Langsung Tunai

3. BMD

<https://bmd.hulusungaiselatankab.go.id>

Aplikasi Rekon BMD membantu manajemen asset daerah di kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada bidang Pengelolaan Barang Milik daerah

4. CCTV
<https://cctv.hulusungaiselatankab.go.id>
Aplikasi Pemantauan CCTV Lalu Lintas Hulu Sungai Selatan
5. CLOUD ABSENSI
<https://cloud.hulusungaiselatankab.go.id>
Data Absensi Berbasis Cloud
6. CORONA
<https://corona.hulusungaiselatankab.go.id>
Website Informasi Resmi Covid-19
7. DANDAMAN
<https://dandaman.hulusungaiselatankab.go.id>
Dispensasi & Rekomendasi Perkawinan Anak
8. DASHBOARD
<https://dashboard.hulusungaiselatankab.go.id>
Dashboard Realisasi APBD
9. DICEK
<https://dicek.hulusungaiselatankab.go.id>
10. DISPOSISI
<https://disposisi.hulusungaiselatankab.go.id>
E-Surat HSS
11. E_IKM
<https://e-ikm.hulusungaiselatankab.go.id>
12. EBUKU
<https://ebuku.hulusungaiselatankab.go.id>
Aplikasi Perpustakaan Berbasis Digital
13. EJADWAL
<https://ejadwal.hulusungaiselatankab.go.id>
14. EKINERJA
<https://ekinerja.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem Elektronik Penilaian Kinerja Pegawai
15. ELITBANG
<https://elitbang.hulusungaiselatankab.go.id>
Elitbang Bappeda
16. ELPPD
<https://elppd.hulusungaiselatankab.go.id>

17. EMONEV
<https://emonev.hulusungaiselatankab.go.id>
Monitoring dan Pelaporan Capaian Perangkat Daerah pada Periode Tertentu
18. EMS
<https://ems.hulusungaiselatankab.go.id>
Elektroinik Monitoring System
19. ESAKIP
<https://esakip.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem penetapan dan pengukuran, pengumpulan data kinerja instansi pemerinatah
20. ESURAT
<https://esurat.hulusungaiselatankab.go.id>
Aplikasi Pendistribusian dan Pечатatan Surat Masuk dan Keluar
21. ETRACKING
<https://etracking.hulusungaiselatankab.go.id>
22. INTAN
<https://intan.hulusungaiselatankab.go.id>
Pengelolaan sistem informasi kegiatan daerah berbasis website
23. JADWALKRU
<https://jadwalkru.hulusungaiselatankab.go.id>
Jadwal dan laporan harian aktivitas
24. JDIHSETWAN
<https://jdihsetwan.hulusungaiselatankab.go.id>
Jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekretariat DPRD
25. KBPK
<https://kbpk.hulusungaiselatankab.go.id>
Kerukunan Barisan Pemadam Kebaakaran Hulu Sungai Selatan
26. LAYANAN DISKOMINFO
<https://layanan.diskominfo.hulusungaiselatankab.go.id>
Layanan Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
27. MAIL
<https://mail.hulusungaiselatankab.go.id>
Aplikasi dan Database Email Hulu Sungai Selatan
28. MAPRES
<https://mapres.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem aplikasi layanan mahasiswa berprestasi

29. MILARA
<https://milara.hulusungaiselatankab.go.id>
Aplikasi Optimasi Penilaian Kinerja Pegawai Non-ASN DISPORAPAR
30. MONALISA
<https://monalisa.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem monitoring dana desa
31. MPP
<https://mpp.hulusungaiselatankab.go.id>
Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan
32. QNAMUI
<https://qnamui.hulusungaiselatankab.go.id>
Website Tanya Jawab MUI Hulu Sungai Selatan
33. PASAR
<https://pasar.hulusungaiselatankab.go.id>
Pasar Online Hulu Sungai Selatan
34. PORPROVKALSEL
<https://porprovkalsel.hulusungaiselatankab.go.id>
Portal Resmi Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Selatan
35. POTPEN
<https://potpen.hulusungaiselatankab.go.id>
Aplikasi untuk merekap dan perizinan sampai ke potensi pajak tahun yang akan datang
36. PUSDATU
<https://pusdatu.hulusungaiselatankab.go.id>
Pusat data terpadu PAUD dan PNF
37. RAPORTSKPD
<https://raportskpd.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem informasi penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah
38. REKRUTMEN
<https://rekrutmen.hulusungaiselatankab.go.id>
Website Seleksi Terbuka Diskominfo Hulu Sungai Selatan
39. RISSA
<https://rissa.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem informasi berbasis elektronik pembinaan PUS dan peserta KB kab. HSS
40. SATUDATA
<https://satudata.hulusungaiselatankab.go.id>
Layanan portal Katalog bertujuan untuk memudahkan masyarakat

mendapatkan data secara terbuka

41. SATUNIK

<https://satunik.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem informasi satu data berbasis NIK yang terintegrasi dengan data kependudukan

42. SEMANIS DARA

<https://semanisdara.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Informasi Kemudahan Pelayanan Sarjana Pendamping Desa Sejahtera

43. SENADA

<https://senada.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem informasi inovasi daerah

44. SEVTI

<https://sevti.hulusungaiselatankab.go.id>

Strategi Evaluasi Teknologi Informasi Organisasi

45. SIAPDES

<https://siapdes.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintah

46. SIAP

<https://siap.hulusungaiselatankab.go.id>

Aplikasi Sistem Informasi Absensi Paud

47. SIBAPERRAME

<https://sibaperrame.hulusungaiselatankab.go.id>

48. SICANTIK BUMILKU

<https://sicantikbumilku.hulusungaiselatankab.go.id>

Dinas Kesehatan Hulu Sungai Selatan

49. SICANTIK

<https://sicantik.hulusungaiselatankab.go.id>

50. SICAPEDES

<https://sicapedes.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Pencatatan Adminstrasi Pemerintah Desa

51. SIDAKAT

<https://sidakat.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem informasi database komoditas asal tumbuhan

52. SIHAPOK

<https://sihapok.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Informasi Harga Pokok

53. SIHARAPAN

<https://siharapan.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Informasi Harga Pangan

54. SIKETUPAD / SIJAK

<https://sijak.hulusungaiselatankab.go.id>

<https://siketupad.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Informasi Keuangan Terpadu Pajak Daerah

55. SIJELI

<https://sijeli.hulusungaiselatankab.go.id>

Aplikasi Sinkronasi Jadwal Eksekutif

56. SIMADU

<https://simadu.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Informasi Musrenbang Terpadu

57. SIMBIOSIS

<https://simbiosis.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Informasi Pendataan Atlet

58. SIMPEG

<https://simpeg.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Informasi Kepegawaian

59. SMAJKIR

<https://smajkir.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Manajemen Uji Kir Terintegrasi

60. SINOPEN

<https://sinopen.hulusungaiselatankab.go.id>

Solusi Penduduk Non Permanen Memperoleh Dokumen Kependudukan

61. SIOPEN

<https://siopen.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Order Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

62. SIPANDU

<https://sipandu.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem pelayanan terpadu pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan

63. SIPATKHUSUS

<https://sipatkhusus.hulusungaiselatankab.go.id>

Sistem Informasi Pemetaan Aset Kabupaten Hulu Sungai Selatan

64. SIPDBOS
<https://sipdbos.hulusungaiselatankab.go.id>
65. SIPEDULI
<https://sipeduli.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem Informasi Pengawasan Distribusi LPG
66. SIPENA
<https://sipena.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem penilaian kinerja pegawai nonASN
67. SIPETINJUCEPAK
<https://sipetinjucepak.hulusungaiselatankab.go.id>
Penyelesaian Tindak Lanjut Cepat dan Akuntabel
68. SISKAS
<https://siska.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem informasi statistik perkawinan
69. SISTAMAL
<https://sistamalbikes.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem Informasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
70. SIVARANI
<https://sivarani.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem Informasi evaluasi & Pelaporan Kinerja
71. SIVERON
<https://siveron.hulusungaiselatankab.go.id>
72. UPG
<https://upg.hulusungaiselatankab.go.id>
Aplikasi Gratifikasi Online Unit Pengendalian Gratifikasi
73. GEOPOTRAL (http)
<http://geoportals.hulusungaiselatankab.go.id>
Informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan menentukan lokasi usulan kegiatan
74. PBB (http)
<http://pbb.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem aplikasi penetapan besaran PBB Perkotaan dan Pedesaan
75. SIMBPHTB (http)
<http://bphtb.hulusungaiselatankab.go.id>
Sistem Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Perbandingan realisasi Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data sistem informasi tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2023
80	79,84	61,53	100

Capaian indikator ini meningkat dari tahun 2021 dengan capaian 61,53 Persen. Peningkatan capaian ini dikarenakan penambahan implementasi layanan penggunaan sistem informasi. Capaian indikator ini pada akhir periode / tahun 2023 adalah sebesar 100 persen.

Untuk meningkatkan Stakeholder yang memanfaatkan data sistem informasi, pada tahun 2023 direncanakan akan dilakukan beberapa hal, antara lain:

- 1) Mengembangkan atau mengimplementasikan sistem layanan pemerintahan yang belum tersedia.
- 2) Meningkatkan akses internet yang aman dan berkualitas pada Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan sistem layanan pemerintahan berbasis elektronik.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
Sasaran Kinerja 2 Meningkatnya Citra Positif Pemkab HSS							
2	Persentase Berita Positif mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persen	jumlah Pemberitaan Positif dibagi Jumlah Pemberitaan mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatandikali 100	100	100	100	Berhasil
RATA - RATA CAPAIAN						100	Berhasil

Persentase Berita Positif mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Capaian 100 persen merupakan perhitungan dari 1.145 berita Pemkab yang ditayangkan di media cetak maupun elektronik keseluruhannya merupakan berita positif. Capaian Indikator Sasaran strategis ini didukung oleh faktor-faktor tercapainya indikator :

- a. Persentase PD di lingkup Pemkab HSS yang mengelola informasi dan komunikasi sesuai dengan UU KIP No.14 Tahun 2008
Capaian Persentase PD di lingkup Pemkab HSS yang mengelola informasi dan komunikasi sesuai dengan UU KIP No.14 Tahun 2008 adalah 100%, dengan capaian 97,4% dari target 97,4% dengan formulasi jumlah PD di lingkup Pemkab HSS yang mengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan UU KIP No.14 Tahun 2008 dibagi jumlah seluruh PD di lingkup Pemkab HSS dikali 100, didapat dari capaian 38 Perangkat Daerah dari target 39 Perangkat Daerah. Adapun daftar Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Jumlah Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

NO	PERANGKAT DAERAH	WEBSITE
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	https://diskominfo.hulusungaiselatankab.go.id/
2.	RSUD Brigjend. H. Hasan Basry	https://rsudhasanbasry.com/
3.	Sekretariat Daerah	https://setda.hulusungaiselatankab.go.id/
4.	Sekretariat DPRD	https://sekretariatdprdkabhss.wordpress.com/
5.	BPKPD	https://bakeuda.hulusungaiselatankab.go.id/
6.	Bappelitbangda	https://bappelitbangda.hulusungaiselatankab.go.id/
7.	BKPSDM	https://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id/
8.	BPBD	https://bpbd.hulusungaiselatankab.go.id/
9.	Inspektorat	https://inspektorat.hulusungaiselatankab.go.id/
10.	Satpol PP dan Damkar	https://satpolppdamkar.hulusungaiselatankab.go.id/
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://disdik.hulusungaiselatankab.go.id/
12.	Dinas Kesehatan	https://dinkes.hulusungaiselatankab.go.id/
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	https://putr.hulusungaiselatankab.go.id/
14.	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	https://disperakplh.hulusungaiselatankab.go.id/
15.	Dinas Sosisal	https://dissos.hulusungaiselatankab.go.id/
16.	Dinas Ketahanan Pangan	https://dkp.hulusungaiselatankab.go.id/
17.	Dinas PPKBPPPA	https://dppkbpppa.hulusungaiselatankab.go.id/
18.	Dinas Dukcapil	https://disdukcatpil.hulusungaiselatankab.go.id/
19.	Dinas PMPTSP	https://dpmpptsp.hulusungaiselatankab.go.id/

20.	Dinas Perikanan	https://diskan.hulusungaiselatankab.go.id/
21.	Disnaker KUKMP	https://disnakerkukmp.hulusungaiselatankab.go.id/
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	https://dpmd.hulusungaiselatankab.go.id/
23.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	https://disporaparkabhss.blogspot.com/
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	https://dispersip.hulusungaiselatankab.go.id/
25.	Dinas Perhubungan	http://dishub.hulusungaiselatankab.go.id/
26.	Dinas Perdagangan	https://disdag.hulusungaiselatankab.go.id/
27.	Dinas Pertanian	https://distanhss.wordpress.com/
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	https://kesbangpol.hulusungaiselatankab.go.id/
29.	Kecamatan Sungai Raya	https://sungairayakec.hulusungaiselatankab.go.id/
30.	Kecamatan Padang Batung	https://padangbatungkec.hulusungaiselatankab.go.id/
31.	Kecamatan Telaga Langsat	https://telagalangsat.hulusungaiselatankab.go.id/
32.	Kecamatan Angkinang	http://angkinangkec.hulusungaiselatankab.go.id/
33.	Kecamatan Kandangan	https://kandangankec.hulusungaiselatankab.go.id/
34.	Kecamatan Simpur	https://simpurkec.hulusungaiselatankab.go.id/
35.	Kecamatan Daha Utara	https://dahautarakec.hulusungaiselatankab.go.id/
36.	Kecamatan Daha Barat	https://dahabaratkec.hulusungaiselatankab.go.id/
37.	Kecamatan Kalumpang	https://kalumpangkec.hulusungaiselatankab.go.id/
38.	Kecamatan Loksado	https://loksadokec.hulusungaiselatankab.go.id/

b. Terpublikasinya Informasi dan Kegiatan Pemerintah daerah

Capaian Persentase Jumlah Informasi dan Kegiatan yang terpublikasi dibagi seluruh informasi dan Kegiatan Pemerintah Daerah adalah 100%, dengan capaian 800 dari target 800 dengan formulasi Jumlah Informasi dan Kegiatan yang terpublikasi dibagi seluruh informasi dan Kegiatan Pemerintah Daerah dikali 100. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Jumlah informasi publik Pemerintah Kab.HSS yang terpublikasikan melalui media cetak, media eletronik dan media sosial dengan cepat, akurat dan mudah diakses : 800 informasi
- Jumlah seluruh informasi publik Pemerintah Kab.HSS : 800 informasi
- $(800/800) \times 100 = 100$

Capaian pada indikator ini didapat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berupa penambahan tenaga ASN jabatan Analis Berita sebanyak 1 (satu) orang sehingga tenaga ASN jabatan Analis Berita menjadi 2 (dua) orang, dan tenaga kontrak IT Media Sosial sebanyak 1 (satu) orang sehingga tenaga kontrak IT Media Sosial menjadi 2 (dua) orang.
- b) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah sesuai Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c) Dukungan dari media mitra strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 3.10 Mitra Strategis Pemerintah Daerah

No	Nama Mitra	Keterangan
1.	Banjarmasin Post	Media Cetak
2.	Radars Banjarmasin	Media Cetak
3.	Kalsel Pos	Media Cetak
4.	Barito Post	Media Cetak
5.	Kalimantan Post	Media Cetak
6.	Antara	Media Eletronik (Online)
7.	Banjarmasin Post Online	Media Eletronik (Online)
8.	Kalsel Pos Online	Media Eletronik (Online)
9.	Apahabar.com	Media Eletronik (Online)
10.	Koranbanjar.com	Media Eletronik (Online)
11.	Info Banua	Media Eletronik (Online)
12.	Wartaniaga	Media Eletronik (Online)
13.	Narasi Publik	Media Eletronik (Online)
14.	Suara Borneo	Media Eletronik (Online)
15.	Radio Gema Amandit	Media Eletronik (Radio)

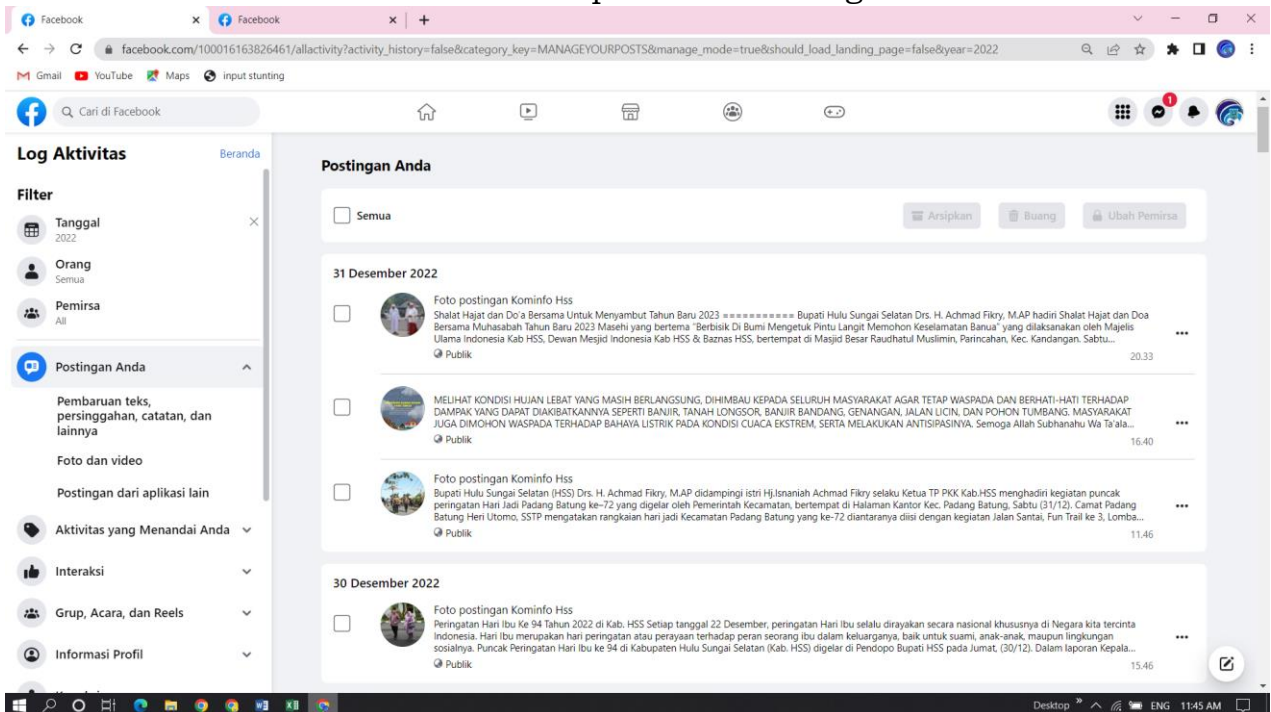
16.	TVRI Kalsel	Media Elektronik (Televisi)
17.	Duta TV	Media Elektronik (Televisi)
18.	TV Kabel Buah Hati	Media Elektronik (Televisi)
19.	TV Kabel PT. Tibung Raya	Media Elektronik (Televisi)
20.	TV Kabel PT. Berkat Setiawan Indah	Media Elektronik (Televisi)

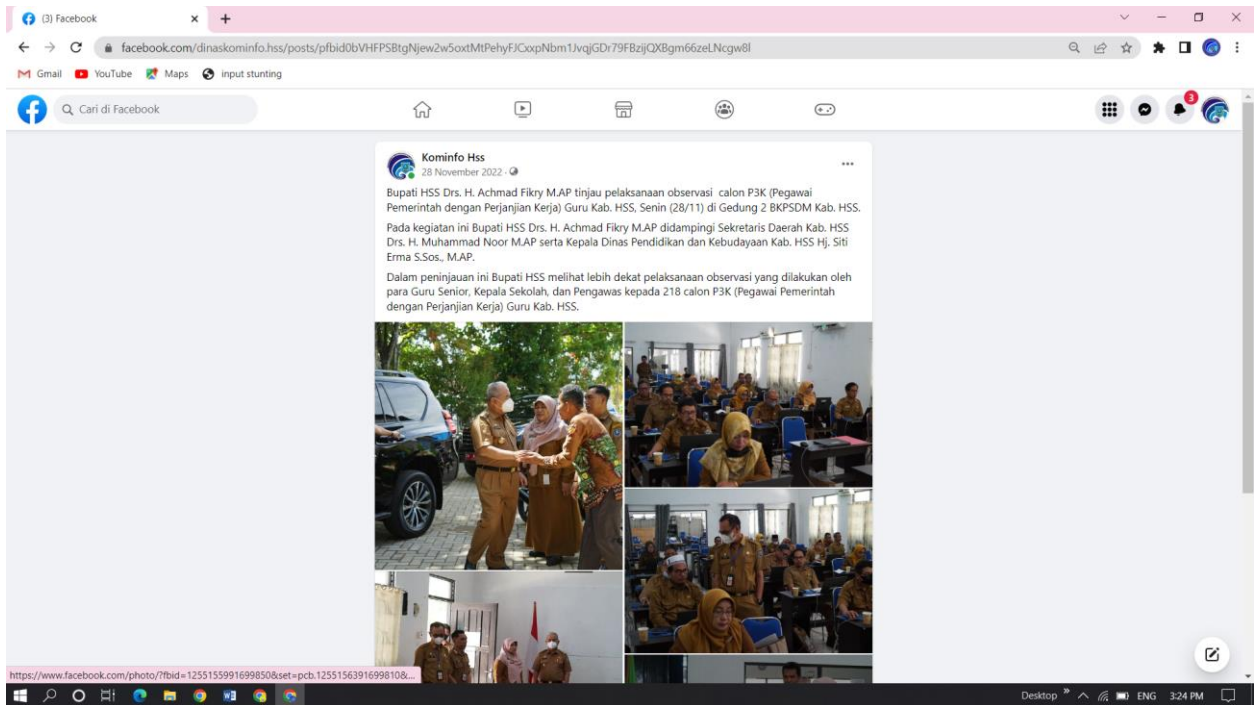
d) Dukungan dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang juga tergabung dalam keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai yang tertuang dalam Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/56/KUM/2021 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

c. Capaian Kinerja Kegiatan dan sub kegiatan pada Program Informasi Dan Komunikasi Publik sebagai berikut :

a) Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang terpublikasi
 Capaian pada indikator ini sebesar 100%, didapat dari capaian 800 berita dari target 800 berita. Adapun sampel informasi publik pemerintah daerah yang terpublikasi sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Sampel Informasi Publik Pemerintah Daerah melalui platform resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan





d. Terkelolanya Media Publikasi Pemerintah daerah

Capaian Jumlah Media Publikasi Pemerintah Daerah yang sesuai standar adalah 100%, dengan capaian 100 dari target 100 dengan formulasi Jumlah Media Publikasi Pemerintah Daerah yang sesuai standar. Jumlah Media Publikasi Pemerintah Daerah yang sesuai standar sebanyak 100 media publikasi. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel . .Jumlah Media Publikasi Pemerintah Daerah Yang Sesuai Standar

Jumlah	Keterangan
38 Website	Website Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
38 Facebook	Facebook Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
17 Media Massa	Media massa cetak dan elektronik yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3 Media Televisi	Media TV Kabel lokal yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2 Website	Website resmi pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1. Website Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan: https://hulusungaiselatankab.go.id/ 2. Website PPID: https://ppid.hulusungaiselatankab.go.id/
2 Media Sosial	YouTube dan Instagram resmi Pemerintah Daerah
100 Media	Jumlah keseluruhan

e. Terlaksananya Kegiatan Peliputan dan Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah

Capaian Terlaksananya Kegiatan Peliputan dan Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah adalah 100%, dengan capaian 800 dari target 800 dengan formulasi Jumlah Kegiatan Peliputan dan Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah. Adapun Kegiatan Peliputan dan Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan meliput, mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Potensi Wilayah Hulu Sungai Selatan serta Promosi untuk mendukung perekonomian Hulu Sungai Selatan.

Perbandingan realisasi Persentase Berita Positif mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Targert 2023
100	100	100	100

Capaian indikator ini berlangsung konsisten dari tahun 2021 hingga tahun 2022 yaitu 100%. Peningkatan capaian ini karena adanya peningkatan SDM dan kerjasama yang baik dengan media publikasi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta adanya koordinasi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk terus mempertahankan konsistensi capaian indikator Persentase Berita Positif mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain:

- 1) Terus mengembangkan kapasitas SDM
- 2) Terus menjaga jalinan kerjasama yang baik dengan mitra kerja publikasi
- 3) Terus mempertahankan koordinasi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 4) Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana penunjang publikasi

3 EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disampaikan bahwa dalam pencapaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan **Efisien** karena anggaran yang digunakan mampu mencapai target Kinerja yang di tetapkan.

Tabel 3.15 Efisiensi Anggaran

NO	efisiensi kinerja sasaran			
	Indikator	capaian kinerja sasaran	realisasi anggaran	efisiensi
1	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data sistem informasi	100	91,75	8,25
2	Persentase Berita Positif mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100	96,77	3,23

NO	efisiensi kinerja program			
	Indikator	capaian kinerja program	realisasi anggaran	efisiensi
1	Jumlah Kunjungan pada Sitem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun	100	91,75	8,25
2	Jumlah Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Terpublikasi	100	96,77	3,23
3	Jumlah Perangkat Daerah (PD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Melakukan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi			
4	Jumlah Media Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten			
5	Persentase Sistem Informasi dengan status Aman	100	89,12	1,12
	persentase Database yang sesuai Standar Data Indonesia			
6	Persentase tata kelola Keamanan Informasi yang dilaksanakan dengan status baik	100	89,12	1,12

NO	efisiensi kinerja kegiatan			
	Indikator	capaian kegiatan	relaisasi anggaran	efisiensi
1	Tersedianya Akses Internet yang Mudah	100	97,02	2,98
2	Terlaksananya Survei Pemetaan Blankspot Intenet			
3	Tersediannya Pemetaaan Pengguna Data			
4	Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Pengguna Data			
5	Tersedianya panduan/informasi Penggunaan Sistem Informasi	100	90,15	9,85
6	Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi			
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Internet			
8	Presentase Jumlah Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Terpublikasi dengan Cepat, Transparan dan Akurat	100	96,77	3,23
9	Presentase Perangkat Daerah (PD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Mengelola Informasi dan Dokumentasi Sesuai dengan UU KIP No 14 Tahun 2008			
10	Presentase Media Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten yang Terkelola dengan Baik			
11	Persentase SDM Pengelola Data yange berkompentensi	100	89,12	1,12
12	Jumlah dokumen Pemetaan Kebutuhan SDM Pengelola Data			
13	Jumlah Variasi Database yang berisi Meta data			
14	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Data			
15	Jumlah Dokumen Laporan Monev			
16	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Data			
17	Jumlah Kegiatan Koordinasi Monitoring dengan Lintas Sektor			

18	Jumlah Kegiatan Pemuktahiran Data			
19	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi			
20	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
21	Jumlah Perangkat Pendukung Sistem Informasi	100	92,17	1,91
22	Jumlah Kegiatan Mitigasi Risiko Data Sistem Informasi			
23	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			

NO	efisiensi kinerja subkegiatan			
	Indikator	capaian sub kegiatan	relaisasi anggaran	efisiensi
1	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100	97,02	2,98
2	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	100	91,94	5,81
3	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	100	87,98	12,02
4	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	100	85,70	14,30
5	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100	70,29	29,71
6	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100	78,29	21,71
7	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	100	32,39	67,61
8	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100	96,32	3,68
9	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Media Komunikasi Publik	100	94,12	5,88
10	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	100	98,89	1,11
11	Jumlah Layanan Hubungan Media	100	100	0

12	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	84,47	15,53
13	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	100	96,86	3,14
14	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas Dalam Mendiseminasikan Informasi Program Atau Kebijakan	100	99,72	0,28
18	Jumlah Pelatihan Statistik Sektoral	100	75,37	1,33
19	Jumlah dokumen HSS dalam angka, Kecamatan dalam angka dan Statistik daerah	100	97,84	1,02
20	Jumlah pelatihan keamanan informasi yang diikuti	100	86,73	1,00
21	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas tim pengamanan informasi kabupaten	100	92,17	1,00
22	Jumlah sarana dan prasarana SOC	100	92,17	1,00
23	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	66,67	1,50
24	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100	60,00	1,67
25	Jumlah Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	90,75	1,10
26	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	63,63	1,57
27	laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang memenuhi aspek kualitas	100	80,00	1,25
28	Jumlah Laporan atau Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang memenuhi aspek kualitas	100	90,99	1,10
29	Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas KOMINFO Kab. HSS yang memenuhi aspek kualitas	100	74,84	1,34
30	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	96,93	1,03
31	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100,00	1,00
32	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100	100,00	1,00
33	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	92,81	1,08
34	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	72,24	1,38
35	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	95,94	1,04
36	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	69,33	1,44
37	Jumlah Bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100	87,00	1,15
38	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	37,00	2,70

39	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	68,08	1,47
40	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	92,13	1,09
41	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor ata	100	94,06	1,06

4 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 12.055.501.458,- dari pagu Rp. 12.820.144.518,- atau sebesar 94,04 %. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran

NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI ANGGARAN		DEVIASI ANGGARAN (%)
		Rp.	%	
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.634.881.246	3.335.072.620	91,75	8,25
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.799.450	3.017.100	30,79	69,21
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.299.750	2.717.100	37,22	62,78
Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.499.700	300.000	12,00	88,88
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.683.917.096	2.588.525.631	96,45	3,55
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.648.917.496	2.557.847.781	96,56	3,44
Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000	28.903.000	96,34	3,66
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.999.750	875.000	43,76	56,24
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.499.850	899.850	60,00	40,00
Sub Kegiatan: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	0	0	100,00
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.332.200	430.335.686	84,49	15,51
Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.400.000	42.400.000	80,92	19,08
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.925.000	189.857.000	83,30	16,70
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.303.000	58.389.900	70,09	29,91
Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.804.200	9.319.500	62,95	37,05
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.900.000	5.550.000	94,07	5,93
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	124.819.286	99,86	0,14
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.550.000	62.545.000	91,24	8,76
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	65.000.000	60.000.000	92,31	7,69

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.325.500	137.298.410	72,14	27,86
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000	34.500	9,86	90,14
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.100.000	94.996.890	65,92	34,08
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.875.500	42.267.020	92,13	7,87
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.957.000	113.350.793	65,54	34,46
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.069.000	74.986.393	63,51	36,49
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.600.000	2.170.000	13,91	86,09
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.288.000	36.194.400	92,13	7,87
Program: Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.315.656.160	4.176.392.790	96,77	3,23
Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.315.656.160	4.176.392.790	96,77	3,23
Sub Kegiatan: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	58.994.000	46.189.000	78,29	21,71
Sub Kegiatan: Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	10.745.000	3.480.000	32,39	67,61
Sub Kegiatan: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	788.228.000	759.256.706	96,32	3,68
Sub Kegiatan: Pengelolaan Media Komunikasi Publik	71.400.000	67.200.000	94,12	5,88
Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	1.007.400.000	996.232.000	98,89	1,11
Sub Kegiatan: Layanan Hubungan Media	216.000.000	216.000.000	100,00	-
Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	443.601.160	374.730.540	84,47	15,53
Sub Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	39.288.000	38.054.544	96,86	3,14
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.680.000.000	1.675.250.000	99,72	0,28
Program: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	93.649.000	85.755.438	91,57	8,43
Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	93.649.000	85.755.438	91,57	8,43
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	74.920.500	71.015.438	94,79	5,21

Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	18.728.500	14.740.000	78,70	21,30
Program: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.472.892.312	4.193.252.260	93,75	6,25
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	303.065.800	265.028.350	87,45	12,55
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi daerah	303.065.800	265.028.350	87,45	12,55
Sub Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan sumber daya keamanan	30.000.000	26.019.550	86,73	13,27
Sub Pelaksanaan Keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	245.424.800	226.203.800	92,17	7,83
Sub Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	27.641.000	12.805.000	46,33	53,67
Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.341.950.000	2.272.255.410	97,02	2,98
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.341.950.000	2.272.255.410	97,02	2,98
Kegiatan: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.130.942.312	1.920.996.850	90,15	9,85
pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	489.925.700	419.880.000	85,70	14,30
pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	643.313.500	566.000.000	87,98	12,02
pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupatenkota cerdas dan kota cerdas	978.273.112	921.460.000	94,19	5,81
pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	19.430.000	13.656.850	70,29	29,71
Jumlah	12.820.144.518	12.055.501.458	94,04	5,96

5 Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terlihat bahwa dari 4 (empat) sasaran yang ada, sebanyak 3 (tiga) sasaran menunjukkan pencapaian yang sama dengan target, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.16 Tingkat Efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya Pemanfaatan Sistem	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan	100	91,75	8,25

	Informasi yang Terintegrasi	data sistem informasi			
2	Meningkatnya Citra Positif Pemkab HSS	Persentase Berita Positif mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100	96,77	3,23

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Efisiensi anggaran tahun 2022 diperoleh dari perbandingan antara IKU yang mempunyai capaian kinerja 100% atau lebih dan anggaran program yang mendukung IKU tersebut secara langsung, dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data sistem informasi sebesar 100%, dengan efisiensi sebesar 8,25%. Diperoleh dari perbandingan capaian IKU dan Program yang mendukungnya. Dengan rincian Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran 91,75%, sehingga tingkat efisiensi pada program tersebut sebesar 8,25%. Efisiensi pada program ini didapat karena banyaknya kegiatan koordinasi dengan instansi pusat untuk pengembangan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
2. Persentase Berita Positif mengenai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan efisiensi sebesar 3,23%. Diperoleh dari perbandingan capaian IKU dan Program yang mendukungnya. Dengan rincian Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran 96,77%, sehingga tingkat efisiensi pada program tersebut sebesar 3,23%.

C. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2021

7.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2021

Dari hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021, bahwa penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra belum sepenuhnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangkamenengah.
2. Target kinerja yang ditetapkan telah selaras dengan target kinerja pada RPJMD.

3. Dokumen Renstra belum menyajikan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Tujuan Sasaran dalam RPJMD.
4. Dokumen Renstra belum menyajikan Indikator Kinerja Utama baik IKU Pemerintah Daerah maupun IKU Unit Kerja, begitu pula dengan Dokumen Perencanaan Kinerja.
5. Dokumen perencanaan kinerja belum memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan/target jangka pendek.
6. Dokumen perencanaan belum selaras dengan dokumen Renstra dan dokumen perencanaan kinerja di atasnya.
7. Dokumen perencanaan belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja).
8. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penetapan kinerja yang dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
9. Indikator Kinerja Utama Unit Kerja belum selaras dan belum merupakan breakdown dari IKU Pemerintah Daerah.
10. Format penyajian Indikator Kinerja Utama SKPD belum sesuai dengan ketentuan.
11. Pelaporan Kinerja belum dapat menyajikan capaian kinerja sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga pelaporan belum dapat diandalkan.
12. Pelaporan Kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja organisasi secara keseluruhan.
13. Informasi yang disajikan dalam Pelaporan Kinerja belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
14. Pelaporan Kinerja hanya menyajikan informasi keuangan per program dan belum mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome). Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja yang dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward and punishment.
15. Belum disajikannya evaluasi terhadap masing-masing program, yang hasilnya berupa kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi serta belum tersajinya rekomendasi untuk ditindaklanjuti serta perencanaan kedepannya yang tersaji dalam Action Plan (Rencana Aksi per triwulan).
16. Rata-rata capaian kinerja (Outcome) untuk Tahun 2021 belum tersajikan dalam Pelaporan Kinerja.

F.1. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 telah melaksanakan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen penyesuaian renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah yang selaras dengan target kinerja pada RPJMD.
2. Menyusun Dokumen Renstra yang menyajikan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Tujuan Sasaran dalam RPJMD, serta menyajikan Indikator Kinerja Utama baik IKU Pemerintah Daerah maupun IKU Unit Kerja, begitu pula dengan Dokumen Perencanaan Kinerja.
3. Menyusun Dokumen perencanaan menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja).
4. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan terhadap target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Serta memperkuat Koordinasi antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Telah menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja belum selaras dan belum merupakan breakdown dari IKU Pemerintah Daerah dengan format penyajian yang sesuai dengan ketentuan.
6. Menyusun Pelaporan Kinerja yang menyajikan Rata-rata capaian kinerja (Outcome), capaian kinerja sesuai dengan yang diperjanjikan, menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja organisasi secara keseluruhan, dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta menyajikan informasi keuangan per program dan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome) dan menyajikan evaluasi terhadap masing-masing program, yang hasilnya berupa kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi rekomendasi untuk ditindaklanjuti serta perencanaan kedepannya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang sesuai target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2021. Dengan capaian kinerja keuangan belanja sebesar 94,04%. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Dari hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, dapat disimpulkan semua indikator memperoleh capaian 100%.

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh yang merupakan langkah untuk mewujudkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya dapat dirumuskan dengan saransaran/rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja yang diukur secara berkala (per triwulan);
- 2) Untuk pemenuhan standar sistem layanan pemerintahan dan publik berbasis elektronik perlu dibuat masterplan untuk memudahkan perencanaan pembuatan standar sistem layanan pemerintahan, serta memperbanyak koordinasi dengan instansi pusat mengenai layanan SPBE.
- 3) Untuk peningkatan akses internet OPD perlu dibangun penambahan jaringan e-government secara berkelanjutan untuk seluruh OPD dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitasi teknologi informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi public serta rencana penerapan aplikasi yang terintegrasi antar OPD sekaligus efisiensi anggaran belanja internet yang sebelumnya dianggarkan pada masing-masing OPD.
- 4) Meningkatkan kualitas berita/informasi yang ditampilkan dalam website dengan selalu update berita/informasi terbaru kegiatan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengingat pada saat ini kebutuhan akan informasi dan media pengakses informasi semakin banyak dan mudah diperoleh.
- 5) Peningkatan peran aktif Masyarakat dalam penyebarluasan informasi melalui berbagai media berbasis teknologi informasi dengan semakin meningkatnya akses telekomunikasi dan akses internet di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- 6) Perlunya sosialisasi maupun bimbingan teknis berkelanjutan dalam bidang TIK baik untuk aparatur pemerintah, siswa maupun asyarakat.
- 7) Perlunya peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 8) Perlunya peningkatan kerjasama dengan Lembaga/satuan kerja/ organisasi/komunitas yang berkecimpung dalam program atau kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.